

# DISPARITAS PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

**Fiji Sugama**

Program Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

**Abstract. Between Regional Development Disparities.** The purpose of this study was to analyze the conditions of development disparity and the factors that most influence the development disparity between the Regency/City in Riau Province, as well as to analyze the correlation between the disparities of development and prosperity. The research method uses quantitative and qualitative approaches. Data used is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics and agencies associated with this research. Data were analyzed using multiple linear regression. After doing research, it was found that the value of the index development gaps between regions in Riau province is at a high level. Factors that most influence on the development disparity between the Regency/City in Riau Province is the Human Development Index. The disparity between the development and welfare of the community there is a causal relationship, as well as the correlations between them are positive.

**Keywords:** disparity of development, per capita income, human development index, between regional

**Abstrak. Disparitas Pembangunan Antar Daerah.** Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi disparitas pembangunan dan faktor yang paling berpengaruh terhadap disparitas pembangunan antar Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, serta menganalisis korelasi antara disparitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data digunakan adalah data skunder yang didapatkan dari Biro Pusat Statistik dan instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa nilai indeks ketimpangan pembangunan antar daerah di Provinsi Riau berada pada tingkat yang tinggi. Faktor yang paling berpengaruh terhadap terhadap disparitas pembangunan antar Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau adalah Indeks Pembangunan Manusia. Antara disparitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terdapat hubungan kausalitas, serta korelasi antara keduanya bersifat positif.

**Kata kunci:** disparitas pembangunan, pendapatan perkapita, indeks pembangunan manusia, antar daerah

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses perbaikan yang berkesinambungan terhadap masyarakat dan sistem sosial ekonomi secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik. Yang di maksud dengan pembangunan menurut widodo (2006) adalah upaya multidimensional yang meliputi perubahan pada berbagai aspek termasuk didalamnya struktur sosial, sikap masyarakat, serta intitutional tanpa mengesampingkan tujuan awal yaitu pertumbuhan ekonomi, penangan ketimpangan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja dan untuk meningkat-

kan kesejahteraan masyarakat.

Menurut UNDP, dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Kualitas modal manusia ini misalnya dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya sebagaimana dapat dilihat dalam berbagai laporan pembangunan manusia yang dipublikasikan oleh Badan PBB untuk Pembangunan Manusia.

Dengan pertimbangan itu maka dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia,

termasuk dalam konteks ekonomi regional. Hal ini penting karena kebijakan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya. Dengan kata lain, peningkatan kualitas modal manusia diharapkan juga akan memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antar daerah yang memiliki keragaman sosial ekonomi yang tinggi.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang merata, pertumbuhan yang cepat dan tidak diimbangi dengan pemerataan akan menimbulkan ketimpangan wilayah (*Regional Disparity*), Ketimpangan pembangunan antar daerah dapat terlihat dari adanya daerah yang maju dan daerah yang berkembang bahkan terbelakang. Pengamatan yang dilakukan para peneliti sosial ekonomi, berkesimpulan bahwa di negara-negara berkembang kurang memperhatikan masalah pemerataan baik berupa kemiskinan, pengangguran dan tidak meratanya pembagian pendapatan (Callysta, 2011).

Fenomena disparitas daerah memang sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah karena berbagai alasan. Disparitas tersebut tidak hanya terjadi pada lingkup negara, bahkan sampai pada wilayah provinsi atau unit yang lebih rendah sekalipun. Sering kali disparitas menjadi permasalahan yang serius bagi setiap wilayah karena berpotensi menimbulkan konflik finansial, sosial, atau hubungan yang saling memperlemah antar daerah. Wilayah hinterland akan menjadi lemah karena eksploitasi sumber daya yang berlebihan, sementara wilayah inti juga dapat menjadi lemah karena faktor urbanisasi yang tinggi.

Ketimpangan antar daerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat

pada setiap wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Developed Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdeveloped Region*). Terjadinya ketimpangan antar daerah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar daerah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Sjafrizal, 2008).

Pembangunan di Provinsi Riau terjadi berbagai kendala, baik Kendala geografis maupun potensi sumberdaya alam terutama kekayaan alam migas yang tidak sama antar daerah Kabupaten/Kota, bahkan sumberdaya manusia sebagai tenaga kerja dalam pembangunan juga terkadang menjadi masalah bagi pembangunan itu sendiri dan besaran biaya pembangunan yang dimiliki pemerintah daerah. Ketimpangan selama ini berlangsung dalam berbagai bentuk, aspek dan dimensi, seperti terjadinya ketimpangan hasil-hasil pembangunan, terjadinya disparitas pendapatan antar daerah kabupaten atau kota, ketimpangan antara desa dan kota, disparitas antar sektoral dan disparitas regional.

Terdapat korelasi yang positif antara pembangunan manusia dengan tingkat kesejahteraan penduduk yang diukur dari pendapatan perkapita. Kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan Indeks Pembangunan Manusia lebih tinggi pada umumnya memiliki pendapatan perkapita yang tinggi. Pendapatan regional perkapita Kota Pekanbaru pada tahun 2010 atas dasar harga konstan sebesar Rp.10,01 juta, Kota Dumai sebesar Rp.8,20 juta. Sedangkan daerah-daerah dengan pendapatan regional perkapita terendah adalah Rokan Hulu sebesar Rp.5,39 juta, Kampar sebesar Rp.6,79 juta, Bengkalis sebesar Rp.6,86 juta, dan Rokan Hilir sebesar Rp.7,45 juta.

Permasalahan disparitas atau kesenjangan antar daerah dapat menimbulkan

konflik finansial, ekonomi, sosial atau urbanisasi yang dapat saling memperlemah antar daerah, daerah penunjang atau panyanglah dapat berdampak buruk karena eksplorasi sumber daya yang berlebihan sementara daerah inti juga dapat menjadi lemah karena faktor urbanisasi yang tinggi. Pembangunan salah satunya adalah untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan, namun kenyataannya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga hasil pembangunan belum di nikmati masyarakat Riau secara merata, sementara semakin lebarnya ketimpangan pembangunan dapat berdampak kepada tingkat ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota terjadinya ketidakadilan dalam hal menikmati pembangunan oleh masyarakat di Provinsi Riau. Untuk dapat melihat tingkat disparitas pembangunan antar daerah diperlukan indikator-indikator dari proses pembangunan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita sering kali menjadi acuan suatu wilayah sebagai output dari suatu proses pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat atau sosial, dan tidak kalah pentingnya menjadi ukuran dari suatu proses pembangunan. Disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah diukur dengan menggunakan rumus Indeks williamson. Dimensi indeks disparitas pembangunan terdiri dari pendapatan perkapita, indeks pembangunan manusia, angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Indeks Williamson merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah yang semula dipergunakan oleh Jeffrey G. Williamson. Perhitungan indeks Williamson didasarkan pada data PDRB masing-masing daerah digunakan rumus hasil pengukuran dari nilai indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau  $0 < V_w < 1$ . Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi (Safrizal, 1997). Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui disparitas pembangunan antar daerah/kota di Provinsi Riau.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Dalam rangka pengumpulan data, maka digunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari publikasi yang dilakukan oleh pihak lain. Data sekunder tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik dan instansi/lembaga lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Teknik analisis data Disparitas Pembangunan Antar Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Riau, digunakan analisis deskriptif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini data dianalisis dengan teknik indeks williamson, pengujian asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda.

## HASIL

### Pendapatan Perkapita Tanpa Migas

Berdasarkan data sekunder BPS Riau Tahun 2009-2014, terlihat bahwa pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Provinsi Riau dihitung menggunakan data PDRB. Jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun juga mempengaruhi PDRB per kapita yang diperoleh dari pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk, dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Frekuensi PDRB Perkapita Dengan Migas Tahun 2009-2013 Atas Harga Konstan 2000 di Kabupaten/Kota Provinsi Riau**

No	Kabupaten/ Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kuantan Singingi	10,18	10,65	11,03	11,56	12,53
2	Indragiri Hulu	11,33	11,61	12,04	12,52	13,25
3	Indragiri Hilir	9,12	10,16	10,53	11,24	12,11
4	Pelalawan	10,84	10,92	11,26	11,35	11,26
5	Siak	41,31	36,29	34,94	33,58	32,34
6	Kampar	13,38	13,31	13,65	13,85	14,23
7	Rokan Hulu	5,68	5,70	5,99	6,03	6,09
8	Bengkalis	50,74	55,77	58,87	56,38	53,11
9	Rokan Hilir	21,63	20,58	20,10	19,47	19,29
10	Kep. Meranti	12,25	12,11	12,38	12,97	13,65
11	Pekanbaru	9,57	10,08	10,66	11,36	12,14
12	Dumai	14,50	14,64	14,84	15,15	15,80
13	Riau	210,53	211,82	216,29	215,46	18,08

Sumber: Data BPS Provinsi Riau, 2015

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa PDRB Perkapita Dengan Migas Tahun 2009-2013 Atas Harga Konstan 2000 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun PDRB Perkapita Dengan Migas Tahun 2009-2013 Atas Harga Konstan 2000 dari tiap kabupaten/kota yang berbeda.

**Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan data sekunder BPS Riau Tahun 2009-2014, terlihat bahwa Kualitas Indeks Pembangunan Manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Riau dihitung menggunakan kinerja pembangunan manusia suatu daerah diukur dari kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari waktu ke waktu pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2013 seperti tercantum pada tabel 2.

**Tabel 2. Frekuensi Indeks Pembangunan Manusia abupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2013**

No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kuantan Singingi	73,38	73,70	74,15	74,50	74,77
2	Indragiri Hulu	73,89	74,18	74,54	74,90	75,21
3	Indragiri Hilir	74,95	75,24	75,71	76,15	76,41
4	Pelalawan	72,69	73,18	73,59	73,92	74,27
5	Siak	76,05	76,46	76,92	77,27	77,44
6	Kampar	74,14	74,43	75,18	75,54	75,83
7	Rokan Hulu	72,29	72,66	73,10	73,62	73,87
8	Bengkalis	74,64	75,11	75,53	75,86	76,12
9	Rokan Hilir	71,98	72,43	72,83	73,17	73,45
10	Kepulauan Meranti	70,15	70,62	71,08	71,47	71,80
11	Kota Pekanbaru	77,86	78,27	78,72	79,16	79,47
12	Kota Dumai	77,33	77,75	78,25	78,73	78,99
	Riau	75,60	76,07	76,53	76,90	77,25

Sumber: Data BPS Provinsi Riau, 2015

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2013 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2013 dari tiap kabupaten/kota yang berbeda.

**Angka Harapan Hidup**

Data Angka Harapan Hidup diperoleh melalui survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu Angka Harapan Hidup juga menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menilai Indeks Pembangunan Manusia. Angka Harap Hidup dari waktu ke waktu, dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Frekuensi Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2013**

No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kuantan Singingi	68,22	68,33	68,43	71,69	68,61
2	Indragiri Hulu	68,71	68,81	68,91	68,53	69,03
3	Indragiri Hilir	71,14	71,39	71,63	69,01	71,95
4	Pelalawan	68,69	68,82	68,95	71,88	69,17
5	Siak	71,52	71,69	71,86	69,08	72,07
6	Kampar	68,36	68,52	68,67	72,03	68,92
7	Rokan Hulu	67,13	67,17	67,21	68,83	67,28
8	Bengkalis	70,24	70,35	70,46	67,26	70,61
9	Rokan Hilir	67,11	67,18	67,25	70,56	67,41
10	Kepulauan Meranti	68,61	68,73	68,86	67,32	69,00
11	Kota Pekanbaru	71,24	71,45	71,67	68,98	71,94
12	Kota Dumai	71,33	71,64	71,95	71,88	72,29
	Riau	71,25	71,40	71,55	72,26	71,73

Sumber: Data BPS Provinsi Riau, 2015

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2013 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2013 dari tiap kabupaten/kota yang berbeda.

**Angka Melek Huruf**

Angka melek huruf berdasarkan Kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Semakin besar angka melek huruf diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan dapat semakin meningkat, dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Frekuensi Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2013**

No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kuantan Sengingi	97,81	97,82	98,06	98,09	98,10
2	Indragiri Hulu	97,76	98,16	98,21	98,22	98,20
3	Indragiri Hilir	98,79	99,06	99,15	99,18	99,20
4	Pelalawan	98,44	98,46	98,48	98,51	98,50
5	Siak	98,49	98,56	98,65	98,68	98,70
6	Kampar	98,44	98,48	98,58	98,60	98,60
7	Rokan Hulu	97,98	98,28	98,37	98,40	98,40
8	Bengkalis	97,79	98,09	98,16	98,17	98,20
9	Rokan Hilir	97,80	97,99	98,15	98,18	98,20
10	Kepulauan Meranti	89,73	90,18	90,34	90,36	90,60
11	Kota Pekanbaru	99,80	99,87	99,89	99,90	99,90
12	Kota Dumai	99,30	99,31	99,35	99,40	99,40
	Riau	98,11	98,35	98,42	98,45	98,50

Sumber: Data BPS Provinsi Riau, 2015

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2013 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2013 dari tiap kabupaten/kota yang berbeda.

#### Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Semakin besar Angka Rata-Rata Lama Sekolah diharapkan dapat memberi kesempatan pada masyarakat untuk memiliki tingkat pendidikan menjadi lebih tinggi, hal ini sangat positif karena dengan demikian masyarakat dapat mencari pekerjaan yang lebih baik dengan penghasilan yang lebih besar. Angka rata-rata lama sekolah, dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5. Frekuensi Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2013**

No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kuantan Sengingi	7.81	7.99	8.03	8.06	8.17
2	Indragiri Hulu	7.96	7.98	8.01	8.01	8.14
3	Indragiri Hilir	7.62	7.62	7.63	7.63	7.66
4	Pelalawan	7.95	8.21	8.24	8.24	8.37
5	Siak	9.03	9.08	9.14	9.14	9.16
6	Kampar	8.46	8.49	8.92	8.93	8.97
7	Rokan Hulu	7.55	7.56	7.68	7.94	7.96
8	Bengkalis	8.99	9.12	9.17	9.18	9.22
9	Rokan Hilir	7.48	7.87	7.89	7.90	7.90
10	Kepulauan Meranti	7.32	7.32	7.35	7.35	7.41
11	Kota Pekanbaru	11.32	11.33	11.34	11.35	11.42
12	Kota Dumai	9.72	9.72	9.73	9.74	9.76
	Riau	8.56	8.58	8.63	8.64	8.78

Sumber: Data BPS Provinsi Riau, 2015

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2013 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2013 dari tiap kabupaten/kota berbeda.

#### Disparitas Pembangunan Antar daerah

##### PDRB Perkapita

Pendapatan Perkapita dengan Migas menggunakan formulasi Indeks Williamson.

**Tabel 6. Indeks Williamson PDRB Perkapita Dengan Migas Atas Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2013**

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
IW PDRB Perkapita Dengan Migas	3,2190	3,3208	3,4070	3,1962	2,9324

Sumber: Data Olahan, 2015

PDRB Perkapita Dengan Migas Atas Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama periode 2009-2013 terus menunjukkan penurunan disparitas dengan kategori tingkat disparitasnya tinggi. Pada tahun 2009 tingkat disparitasnya sebesar 3,2190 dan naik menjadi 2,9324 pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas PDRB Perkapita Dengan Migas Atas Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau semakin baik.

##### Disparitas Pembentuk Pembangunan Antar daerah

**Tabel 7. Indeks Williamson Pembentuk Pembangunan Antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2013**

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
IW IPM (X1)	0,2506	0,2495	0,2585	0,2643	0,2634
IW Angka Harapan Hidup (X2)	0,2010	0,2082	0,2230	0,2014	0,2338
IW Angka Melek Huruf (X3)	0,1849	0,1785	0,1793	0,1803	0,1760
IW Rata-Rata Lama Sekolah (X4)	0,4700	0,4564	0,4642	0,4654	0,4666

Sumber: Data Olahan, 2015

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat potret disparitas Pembangunan Antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2013 di Provinsi Riau dapat dilihat dari masing-masing komponen pembentuknya. Berdasarkan Indeks Williamson tahun 2013 menunjukkan bahwa disparitas terendah pada aspek Angka Melek Huruf sebesar 0,1760 dan tertinggi adalah aspek Rata-rata Lama Sekolah sebesar 0,4666, disparitas Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,2634 dan disparitas Angka Harapan Hidup sebesar 0,2338. Selama periode tahun 2009-2013 disparitas pembangunan antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau meningkat sebesar 0,0333. Sehingga disparitas IPM di Provinsi Riau meningkat sebesar 0,0128 dari tahun 2009 hingga pada tahun 2013. Disparitas Angka Harapan Hidup di Provinsi Riau meningkat sebesar 0,0328 dari tahun 2009 hingga pada tahun 2013. Disparitas Angka Melek Huruf mampu dikurangi sebesar sebesar 0,0089 di Provinsi Riau dari tahun 2009 hingga pada tahun 2013. Disparitas Rata-rata Lama Sekolah mampu dikurangi sebesar 0,0034 di Provinsi Riau dari tahun 2009 hingga pada tahun 2013.

### Korelasi Antara Disparitas Pembangunan Dengan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk melihat lebih jelas hubungan antara disparitas pembangunan dengan kesejahteraan manusia, maka digunakan hasilnya dapat dilihat pada tabel 8.

**Tabel 8. Hasil Korelasi Antara Disparitas Pembangunan Dengan Kesejahteraan Masyarakat**

Variable	Coefficient	Standar Error	t-Statistic	Probability
C	-2.722729	1.383860	-1.967489	0.0056
Kemiskinan	-3.322006	0.000328	-0.010111	0.0020

Sumber: Data BPS Provinsi Riau, 2015 (Diolah)

Pada tabel 8 dapat dilihat bahwa angka probabilitas disparitas pembangunan terhadap angka kemiskinan sebesar 0,0056 dan angka probabilitas kemiskinan terhadap probabilitas disparitas pembangunan adalah sebesar 0,0020. Kedua angka probabilitas

tersebut lebih kecil dari nilai kritis 0.05 sehingga  $H_a$  dapat diterima, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara disparitas pembangunan dengan kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari segi korelasinya, antara disparitas pembangunan dengan kesejahteraan masyarakat memiliki korelasi yang positif seperti yang terlihat pada tabel. Korelasi yang positif tersebut, hal ini menunjukkan bahwa antara disparitas pembangunan dengan kesejahteraan masyarakat bervariasi dengan arah yang sama. Setelah melakukan analisis perhitungan mengenai hubungan kausalitas dan korelasi antara disparitas pembangunan dengan kesejahteraan masyarakat, didapatkan hasil bahwa ada hubungan kausalitas antara disparitas pembangunan dengan kesejahteraan masyarakat dan korelasi antara kedua variabel tersebut adalah positif.

### PEMBAHASAN

Disparitas pembangunan antar daerah di Provinsi Riau disebabkan perbedaan kondisi pembangunan daerah masing-masing. Daerah-daerah yang kondisi pembangunan lebih baik, disparitas pembangunan lebih cepat diatasi dari kondisi pembangunan daerah yang masih rendah. Disparitas pembangunan daerah dipengaruhi oleh perbedaan pendapatan perkapita masing-masing daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Ada 3 kabupaten yang memiliki PDRB perkapita melebihi PDRB perkapita Provinsi yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir ternyata dapat meningkatkan indeks pembangunan manusianya dari tahun 2009-2013. Indeks pembangunan manusia juga memberikan dampak pada angka harapan hidup. Angka harapan hidup dapat dijadikan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah pada keberhasilan pembangunan kesehatan serta sosial ekonomi di suatu daerah (wilayah).

Terjadinya disparitas dalam pembangunan indeks pembangunan manusia (IPM) dan angka harapan hidup dalam pembangunan antar daerah Kabupaten dan Kota

di Provinsi Riau tahun 2009 sampai tahun 2013 akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam PDRB perkapita dengan migas atas karya konstan 2000 di Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau selama periode tahun 2009-2013. Disparitas dalam indeks pembangunan manusia antar daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau dapat mendorong kurang optimalnya peningkatan ekonomi masyarakat dan sebaliknya. Disparitas pembangunan ekonomi antar daerah (wilayah) dapat menyebabkan kurang optimalnya setiap daerah dalam meningkatkan pembangunan indeks IPM. Hal yang sama juga dapat terjadi antara disparitas pembangunan angka harapan hidup dengan PDRB perkapita, maupun sebaliknya. Jadi terjadinya disparitas dalam pembangunan antar daerah dapat menimbulkan dampak pada pembangunan ekonomi seperti dikemukakan Gunuar Nyedal (dalam Jhingan, 2000) bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab akibat sirkuler yang membuat sikaya mendapat keuntungan lebih banyak dan mereka yang tertinggal dibelakang menjadi makin terhambat. Dampak balik (backwash effect) cenderung membesar dan dampak sebar (spread effect) cenderung mengecil yang memperburuk ketimpangan internasional dan regional di Negara-negara sedang berkembang. Ketimpangan dalam pembangunan ekonomi akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya merumuskan hubungan antar kemiskinan, pertumbuhan dan ketimpangan, salah satu kajian yang baru-naru ini dilakukan (Bourguignon, 2010) menyebutkan bahwa perubahan distribusi (yaitu perubahan pada ketimpangan) mempunyai dampak yang besar pada kemiskinan. Kajian ini juga menyatakan bahwa penting untuk mempertimbangkan pertumbuhan dan distribusi secara bersamaan dan bahwa hubungan antara kemiskinan, pertumbuhan, dan ketimpangan sangat berbeda antar negara.

## SIMPULAN

Disparitas pembangunan antar daerah di Propinsi Riau berada pada kategori tinggi.

Indeks disparitas pembangunan antar daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya kecuali pada tahun 2012, dimana pada saat itu pertumbuhan PDRB perkapita Provinsi Riau tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Faktor yang mempengaruhi disparitas pembangunan antar Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Namun, faktor yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap disparitas pembangunan antar daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dikarenakan, untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan tingkat kesehatan yang lebih baik, harus melakukan pengeluaran yang lebih banyak. Dengan demikian akan tercapai kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Korelasi antara disparitas pembangunan dengan kesejahteraan masyarakat antar Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sangat kuat. Tingginya pembangunan daerah tidak secara signifikan diikuti oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi pula. Jadi terdapat kegagalan untuk merefleksikan pertumbuhan perkapita menjadi perkembangan pembangunan manusia, khususnya di beberapa daerah yang kaya akan sumber daya alam. Jika ditelusuri lebih dalam, ternyata tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah berpotensi kurang lebih sama dengan rata-rata provinsi, bahkan untuk kasus Kabupaten Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu dan Kepulauan Meranti ternyata tingkat kesejahteraan masyarakatnya jauh tertinggal dari rata-rata provinsi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Bourguignon, F. *"The Poverty- Growth- Inequality Triangle"*. Makalah dipresentasikan untuk Dewan Penelitian Hubungan Ekonomi Internasional India. New Delhi, 4 Februari 2004.
- Callysta, A. 2011. *Pemerataan Pembangunan di Negara Berkembang di Era Globalisasi Dalam Menuju Peman-*

- gunan Manusia. <http://aizawaange-la020791.blogspot.com/2011/01/pemerataan-pembangunan-di-negara.htm>. (Juli 2013)
- Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sjafrizal, 1997, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, Jakarta, *Jurnal Buletin Prisma*.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Badouse Media.
- Widodo, T. 2006. *Perencanaan Pembangunan Aplikasi Komputer Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.